

Judul : Utang Luar Negeri Meningkat - Azis: Seimbangkan Indikator Ekonomi
Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Utang Luar Negeri Meningkat **Azis: Seimbangkan Indikator Ekonomi**



Azis Syamsuddin

WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah melakukan pengelolaan utang secara *prudent*, fleksibel dan oportunistik. Sebab, total Utang Luar Negeri (ULN) telah mencapai Rp 6,361 triliun atau setara 41 persen Produk Domestik Bruto (PDB). ULN pemerintah mengalami kenaikan Rp 128 triliun dibanding tahun sebelumnya.

“ULN harus dialokasikan untuk menggerakkan ekonomi riil dan padat karya, agar efektif dan tepat sasaran dalam menjaga keseimbangan indikator makro ekonomi. Itu amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Azis mendorong pemerintah fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) untuk mencari solusi-solusi terukur, dan berhati-hati dalam mendukung belanja produktif.

“ULN harus dialokasikan pada sektor yang berperan membantu rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta penanganan pandemi Covid-19. Antara lain, penanganan kesehatan, kegiatan dan jaminan sosial, pendidikan, konstruksi dan jasa keuangan,” jelas mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Selain mengoptimalkan pembiayaan pembangunan dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menurut Azis, ULN dapat dialokasikan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) harus berkomitmen menjaga struktur ULN tetap sehat, serta memberdayakan pendapatan pajak.

“Kita tidak boleh bergantung atau mengandalkan ULN untuk belanja prioritas pemerintah. Karenanya, pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan pajak dan sektor-sektor lain, untuk memacu perekonomian nasional,” jelasnya.

Terakhir, Azis meminta pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi nasional, serta fokus mengurangi angka kasus penularan Covid-19. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan ULN. ■ ONI